

**PELAKSANAAN PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN KELURAHAN
(LKK) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI
KELURAHAN SAMAPUIN KECAMATAN SUMBAWA**

Edrial ¹ Syamsul Bahri ²

Edrial.unsa@gmail.com² Syamsulbahri68@gmail.com ²

¹ Fisipol Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

² Fisipol Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

ABSTRAKSI

Pelaksanaan sebuah program yang merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban untuk mencapai tujuan dari terbentuknya program tersebut. Oleh karena itu, sangat dipertanyakan bagaimana pelaksanaan pendistribusian bibit padi bersubsidi di Kabupaten Sumbawa?, apa yang menjadi faktor penghambat atau pendukung pelaksanaan pendistribusian bibit padi bersubsidi di Kabupaten Sumbawa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis pendistribusian bibit padi bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendistribusian bibit padi bersubsidi di Kabupaten Kumbawa. kendala-kendala yang sering terjadi saat pelaksanaan pendistribusian bibit padi serta strategi penyuluh pertanian dalam meningkatkan pelaksanaan pendistribusian bibit padi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sumbawa dan Situs penelitian di Dinas Pertanian . Sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendistribusian bibit padi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendistribusian benih padi Tahun 2017, namun ada sedikit masalah yaitu keterlambatan penyaluran bibit padi kepada petani.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Implementasi, pendistribusian, bibit padi*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial di Indonesia sehingga permasalahan kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih, karena sampai saat ini belum ada hasil yang mengembirakan dari setiap program yang telah dilakukan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Di antaranya dengan memperhatikan usaha-usaha mikro yaitu dengan cara memberikan bantuan modal dengan bunga ringan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru melalui program: Jaring Pengaman Sosial (JPS), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (PMDMK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dan program-program lain. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya masih menemui banyak jalan buntu untuk merealisasikan masalah-masalah kemiskinan yang terjadi sampai saat ini sehingga membutuhkan intervensi pemberdayaan agar bisa tercipta suasana atau iklim yang memungkinkan sehingga potensi masyarakat menjadi berkembang. Dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Bahwa Lembaga Keuangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga keuangan yang khusus memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun 2 pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

LKK tidak hanya bertugas sebagai penyalur dana bantuan dari berbagai pihak, namun juga bertugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi program, serta bertugas sebagai pembimbing bagi peminjam dalam melakukan kegiatan usaha dan semua tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan secara profesional (Iurah Samapuin, 2020). LKK dapat benar-benar mewujudkan kondisi yang diinginkan maka manajemen LKK harus

mempersiapkan berbagai hal teknis dan operasional guna kelancaran kegiatannya, termasuk personil yang mampu membimbing para peminjam dalam memanfaatkan modal pinjaman guna menjalankan usahanya. Dari gambaran sementara saat ini, pengelola Program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) masih belum optimal sehingga tujuan dari program tersebut belum bisa tercapai secara keseluruhan. Salah satu 5 penyebab belum optimalnya program tersebut adalah masih banyak dana program yang telah tersalur, namun tidak di gunakan sebagaimana tujuan awal yang mengakibatkan para nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga ringan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Terkait masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Program Lembaga Keuangan Kelurahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa"

PEMBAHASAN

Setiap kegiatan yang dilakukan pastilah akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat utamanya kehidupan sosial ekonomi. Berdasarkan data yang berhasil diumpulkan dari laporan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dan melalui wawancara dengan pengurus, nasabah serta masyarakat sekitar nasabah maka diperoleh suatu informasi untuk mengetahui bagaimana dampak dari program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan samapuin.

1. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan dampak terhadap sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani kuno (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."

Geliat usaha mikro disamapuin terutama kepada penerima LKK Menjadi semakin baik karena berdasarkan testimoni berbagi penerima manfaat LKK semuanya mengatakan sangat terbantuan terutama untuk 46 kelancaran usahannya ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa LKK ini perlu sekali dikembangkan sebagai upaya pengurangan angka kemiskinan dan juga penganguran.

2. Dampak positif program lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Bagi kehidupan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Samapuin.

A. Tambahan modal mudah dan cepat

LKK didirikan untuk membantu masyarakat Kelurahan Samapuin dalam rangka pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan ini dengan cara memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mereka dengan syarat-syarat yang ringan sehingga tidak membebani masyarakat. Obyek dari program LKK adalah pengusaha-pengusaha kecil yang sulit mengembangkan usahanya karena kekurangan dana, sedangkan kalau mengajukan kredit pada Bank maupun lembaga keuangan lain non perbankan kesulitan karena persyaratannya yang harus dipenuhi.

Melihat besaran pinjaman yang diberikan kepada masyarakat tentunya sangat membantu sekali dalam hal penambahan modal usaha, ini 47 dikarenakan mayoritas penerima pinjaman merupakan usaha sembakau serta usaha bakulan sayur-mayur dengan modal tersebut tentunya nilai modal dengan besaran mulai dari Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000 sangat sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh para nasabah.

B. Usaha yang dilaksanakan berkembang

Melalui pinjaman dana yang disediakan program LKK, kebutuhan dana dari usaha-usaha kecil dapat terpenuhi. Dengan demikian usaha-usaha kecil yang dijalankan bisa berkembang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penunggak pinjaman dengan alasan ketidak sediaan dana untuk mengangsur pinjamannya. Sedangkan mereka yang akan mendirikan usaha dan belum terlaksana kerana kebutuhan dana menjadi segera terlaksana dan berjalan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah usaha-usaha kecil yang terdata di Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK).

C. Meningkatkan pendapatan rumah tangga

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pinjaman pada Lembaga Keuangan Kelurahan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan sekaligus mengembangkan usaha yang selama ini telah dijalankan.

Dengan berjalannya bahkan berkembangnya usaha mereka maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Hal ini akan tampak bagi mereka yang memang dengan serius dan penuh tanggung jawab menggunakan dana pinjaman tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, bukan digunakan untuk keperluan yang lain, misalkan memenuhi kebutuhan konsumsi, kesehatan, kebutuhan anak sekolah, dll.

D. Menciptakan pekerjaan atau usaha baru

Selama ini masyarakat yang akan membuka usaha seringkali terbentur pada ketidak tersediaan dana untuk modal membuka usahanya. Mereka berpandangan bahwa untuk membuka usaha harus memiliki modal, walaupun sebenarnya tidak 49 selalu modal uang tapi dengan cara lain misalnya dengan kerjasama dan membangun kepercayaan.

E. Menambah pendapatan pajak (PAD)

Dengan perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pengguna dana program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) maka mereka akan terkema pajak dan restribusi dari usahanya tersebut. Dari pajak dan restribusi itulah kemudian akan menambah pendapatan pemerintah daerah (PAD).

LKK yang berdiri ini menjadi sumber penghasilan penerima manfaat melalui lembaga mandiri LKK yang dipercaya oleh dinas penanaman modal melalui kelurahan samapui sebagai pengawas serta pembina 50 pengelola keuangannya, artinya dana ini hanya bersifat titipan dinas penanaman modal untuk diseleksi oleh kelurahan sebagai penerima serta pengurusnya.

3. Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial merupakan dampak yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata dilihat dan dirasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi social terjadiperubahan social di rumahtangganya. Sehingga faktor penghambat ekonomi masyarakat dapat dipatahkan dengan bantuan LKK yang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat.

**4. Faktor penghambat Program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)
Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Samapuin**

1. Tidak adanya Kesiapan Memulai Usaha

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dari program LKK ini adalah membantu masyarakat khususnya pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya atau membuka usaha dengan harapan bisa meningkatkan pendapatannya sehingga kesejahteraanpun meningkat. Dari faktor tersebut dapat dilihat ada beberapa penerima manfaat tidak siap untuk mengelola keuangan atau modal tersebut sehingga tidak masih adanya masyarakat atau

nasabah penerima bantuan gagal mengembalikan modal usaha tersebut kepada pihak atau pengurus LKK.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan program Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan kelurahan atau mikro memberikan implikasi terhadap social ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergabung menjadi anggotanya. Dengan adanya produksi simpan pinjam yang di tawarkan oleh keuangan mikro membantu masyarakat dalam menambah modal dari modal tersebut masyarakat dapat mengembangkan usahanya dapat dilihat dari hasil sesudah adanya pembiayaan dari lembaga keuangan mikro. Pendapatan para pedagang meningkat dari yang sebelumnya. Hal ini jelas menggambarkan lembaga keuangan mikro di Kelurahan Samapuin memberikan pengaruh yang baik terhadap pendapatan masyarakat.
2. Dibentuknya program LKK untuk membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan melalui penawaran pinjaman bunga lunak pada pengusaha pengusaha yang selama ini kesulitan mengembangkan usahanya karena kesulitan menambah tambahan modal.
3. Penerima manfaat LKK Secara bertahap mampu merasakan manfaat LKK ini dengan dengan keberlanjutan usahanya yang secara kontiyu mereka tekuni hingga saat ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang di tawarkan kepada program LKK sebagai berikut :

1. Pengurus sebaiknya menganalisa calon nasabah dan menetapkan persyaratan pengajuan kredit walaupun tidak seberat Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya.

2. Pengurus LKK melakukan sosialisasi terhadap nasabah dan calon nasabah tentang besarnya manfaat LKK dalam melalui kebutuhan dan masyarakat
3. Pengurus melakukan pengawasan terhadap pengembangan usaha nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Pemerintah kelurahan samapuin berperan aktif dalam mengarahkan dan mensosialisasikan pentingnya menggunakan modal sesuai dengan tujuan program LKK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sajad, S. 1993. *Dari Benih Kepada Benih*. Grasindo. Jakarta.

Sharkansky, I. 1975. *Public Administration : Policy-Making in Government Agencies*. Third Edition. Chicago: College Publishing Company.

Shakasky, I. 1999. *Konsep dan Metode Pemberian Pelayanan Yang Baik*. Bandung: Dirjen PUOD Depdagri dan FISIP Unpad.

Sukarni Hadi, 1984. *Methodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research*